# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

# TAHUN 2021-2026

JANUARI 2023

☎ (0342) 813558
email : disperindag@blitarkab.go.id
Jl. Raya Kediri No. 18 Blitar

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 2021-2026 dapat diselesaikan. Renstra berisi rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun mendatang, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dilakukan guna menindaklanjuti terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar. Hal ini juga sejalan dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, bahwa dalam hal terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah maka dapat dilakukan penyesuaian Renstra-PD tersebut dengan tetap berpedoman pada program, indikator program, pendanaan indikatif urusan dan/atau kewenangan dalam RPJMD.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah memberikan arahan rencana tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, yang kemudian diimplementasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam upaya mendukung capaian visi dan misi kepala daerah disesuaikan dengan perkembangan terkini. Di dalam Renstra juga memuat rumusan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara

berkala serta menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan RKA Perangkat Daerah.

Sistematika Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, terdiri atas Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan urusan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Blitar periode Tahun 2021-2026.

Januari, 2023

Tim Penyusun
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... i
**DAFTAR ISI** ..... iii
**DAFTAR GAMBAR** ..... v
**DAFTAR TABEL** ..... vi

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... I-1
1.1 Latar Belakang ..... I-1
1.2 Landasan Hukum ..... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I-6
1.4 Sistematika Penulisan ..... I-6

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH** ..... II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... II-1
2.1.1 Kepala Dinas ..... II-1
2.1.2 Sekretariat ..... II-2
2.1.2.1 Sub Bagian Keuangan ..... II-2
2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ..... II-3
2.1.3 Bidang Perindustrian ..... II-3
2.1.4 Bidang Perdagangan ..... II-4
2.1.5 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar ..... II-4
2.1.6 Bidang Kemetrologian ..... II-5
2.1.7 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) ..... II-6
2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional ..... II-6
2.1.9 Struktur Organisasi ..... II-7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II-9
2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah ..... II-9
2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah ..... II-11
2.3.3 Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan ..... II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..... II-19
2.4.1 Tantangan Pengembangan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan ..... II-19
2.4.2 Peluang di Bidang Perindustrian dan Perdagangan ..... II-21

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH** ..... III-1
3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... III-3
3.3 Telaah Renstra Kementerian Terkait ..... III-3
3.3.1 Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024 ..... III-6
3.3.2 Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024 ..... III-8
3.3.3 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ..... III-11
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III-14
3.4.1 Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Blitar ..... III-14

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III-15
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..... III-15

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN** ..... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... IV-1

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... V-1

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** ..... VI-1
6.1. Urusan Perdagangan ..... VI-1
6.2. Urusan Perindustrian ..... VI-2
6.3. Urusan Penunjang ..... VI-2

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... VII-1

**BAB VIII. PENUTUP** ..... VIII-1

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran..... I-2
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RKPD..... I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi ..... II-7
Gambar 2.2 Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan (%) ..... II-13
Gambar 2.3 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) ..... II-14
Gambar 2.4 Ekspor Perdagangan Bersih (%)..... II-15
Gambar 2.5 Jenis Sarana Perdagangan ..... II-15
Gambar 2.6 Perkembangan Industri Kecil dan Tenaga Kerja ..... II-17
Gambar 2.7 Jenis Industri Kecil Tahun 2020..... II-17
Gambar 2.8 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja per Jenis Industri ..... II-18
Gambar 2.9 Perkembangan Investasi di Industri Kecil (Rp Milyar)..... II-18
Gambar 2.10 Proporsi Investasi di Jenis Industri Kecil ..... II-19
Gambar 3.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian ..... III-8
Gambar 4.1 Cascading Misi 3 ..... IV-1
Gambar 4.2 Cascading Misi 4 ..... IV-2

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2020 ..... II-14

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin..... II-8

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan ..... II-8

Tabel 2.4 Rincian Aset Tetap Disperindag Kabupaten Blitar..... II-9

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021 Kabupaten Blitar..... II-10

Tabel 2.6 Ekspor Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021 Kabupaten Blitar..... II-12

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... III-1

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati..... III-5

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perdagangan Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan..... III-7

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian..... III-9

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur ..... III-12

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar..... IV-2

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... V-2

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 Kabupaten Blitar ..... VI-3

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... VII-2

Tabel 7.2 Indikator Program Kegiatan Perangkat ..... VII-3

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan merupakan acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik akan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif, sehingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada. Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Perencanaan yang disusun secara sistematis merupakan salah satu unsur dalam proses perencanaan dimana produk perencanaan dihasilkan melalui tahapan-tahapan yang teratur. Terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian perencanaan pembangunan secara antarwaktu maupun antarlevel pemerintahan.

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan jangka panjang 20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), rencana pembangunan daerah untuk 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek atau tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD).

Sesuai dengan amanat undang-undang di atas, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008. Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah menyusun RPJMD Periode 2021-2026 yang

diputuskan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2021-2026 merupakan penjabaran tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025. Dengan adanya penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, maka setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Dalam konteks ini, Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi acuan di dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

**Gambar 1.1**

**Integrasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

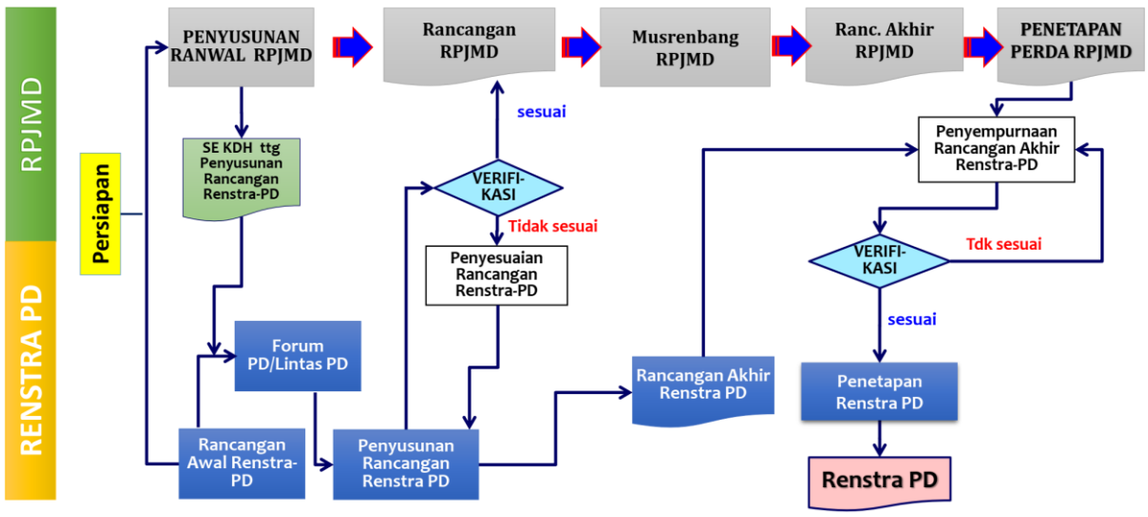



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Renstra berisi rencana kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 tahun mendatang, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada RPJMD. Sehingga, dengan adanya Renstra memiliki arahan/tema pembangunan yang jelas dan terarah di setiap tahunnya.

Penyusunan Renstra sangat penting sebagai gambaran dan pedoman arah kebijakan agar sesuai dengan tahapan RPJMD/RPJPD, serta dikaitkan dengan isu-isu dan dinamika pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, dokumen Renstra juga menyajikan gambaran capaian/evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya sebagai acuan dasar atau bahan pertimbangan, untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang tertuang pada Renstra tahun berjalan.

**Gambar 1.2**
**Tahapan Penyusunan RKPD**




Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Blitar yang membantu kepala daerah terpilih dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat enam tahap dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan

rancangan; 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilakukan melalui lima pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) *bottom-up* dan (5) *top-down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan Musrenbang. Pendekatan *bottom-up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan pendekatan *top-down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated* program.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang dilakukan juga berorientasi substantif Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Orientasi ini menyesuaikan dengan arahan Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Tematik-Holistik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari perangkat daerah dan *stakeholders* terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Perumusan Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 telah melibatkan para pemangku kepentingan dan dilakukan berbasis *e-planning*. Para pemangku kepentingan turut berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan guna menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat.

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Hal ini sejalan dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan

Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, bahwa dalam hal terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah maka Renstra-PD berkenaan dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap berpedoman pada program, indikator program, pendanaan indikatif urusan dan/atau kewenangan dalam RPJMD.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Reviu Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
n. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
o. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
t. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; dan
u. Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII. PENUTUP**

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki struktur yang terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh Sekretariat, Bidang-bidang (Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar, dan Bidang Kemetrologian) dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

### 2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas** : membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta 7 tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal.
b. **Fungsi** Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
    1) pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
    2) pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
    3) perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
    4) pembinaan UPT;
    5) pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan

6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas**: membantu Kepala Dinas dalam dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.

b. **Fungsi:**

1) perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
2) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
3) pengelolaan administrasi kepegawaian;
4) pengelolaan administrasi keuangan;
5) pengelolaan administrasi perlengkapan;
6) pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
7) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
8) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
9) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
10) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
11) pengelolaan kearsipan; dan
12) pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### 2.1.2.1. Sub Bagian Keuangan

a. **Tugas:**

1) menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
3) menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
4) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;

5) menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
7) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

#### 2.1.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. **Tugas**:
1) menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
3) menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
4) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
5) menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
6) menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
7) menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
8) menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
9) menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

### 2.1.3. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas:** membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

b. **Fungsi:**
1) pengoordinasian perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;
2) pengoordinasian penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, peningkatan kerja sama, pemantauan, evaluasi, sarana dan prasarana serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
3) verifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian;

4) pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perindustrian;
5) pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian;
6) pengoordinasian penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan di bidang perindustrian;
7) pengoordinasian peningkatan, pengembangan, dan pemberdayaan investasi dan industri;
8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian;
9) pengoordinasian peningkatan kerja antar sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya; dan
10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 2.1.4 Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas:** membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

b. **Fungsi**: :
1) perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
2) penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perdagangan;
3) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perdagangan;
4) pertimbangan teknis terkait perizinan di bidang perdagangan;
5) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha di bidang perdagangan;
6) penyelenggaraan kegiatan promosi di bidang perdagangan;
7) pengembangan produk unggulan potensial ekspor; dan
8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 2.1.5 Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar

Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas:** membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan pengembangan pasar.

b. **Fungsi:**
1) perumusan bahan dan kebijakan teknis serta pemberdayaan pengembangan Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Pasar;

2) pelayanan, rekomendasi penetapan persetujuan, serta penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib pasar;
3) pencatatan pembayaran dan pelaporan dari wajib retribusi pasar;
4) pembuatan konsep rencana kegiatan, perbaikan, perawatan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
5) pelaksanaan rencana kegiatan pembinaan terhadap pemungutan, pemeliharaan ketertiban dan kebersihan pasar;
6) pembukuan dan pelaporan administrasi pasar;
7) penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran retribusi karcis, kios, los, pelataran dan fasilitas lainnya;
8) pembuatan konsep dan penentuan pemantauan dan evaluasi terhadap retribusi pasar;
9) pelaksanaan sosialisasi budaya tertib kepada pengguna jasa pasar;
10) penyusunan dan penentuan potensi baru di lingkungan pasar untuk meningkatkan pendapatan;
11) pembuatan pengaturan dan penertiban para pedagang pada zonasi yang telah ditetapkan di pasar;
12) pembuatan perencanaan dan penentuan pembinaan kebersihan, ketertiban dan pengamanan pasar dan pedagang pasar; dan
13) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 2.1.6 Bidang Kemetrologian

Kepala Bidang Kemetrologian mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a. **Tugas:** membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kemetrologian;
b. **Fungsi:**
   1) pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya;
   2) pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya;
   3) pembuatan pengelolaan cap tanda tera;
   4) penyediaan dan penjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
   5) penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
   6) pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;

7) pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
8) pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
9) fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
10) penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
11) penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; dan
12) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 2.1.7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

### 2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

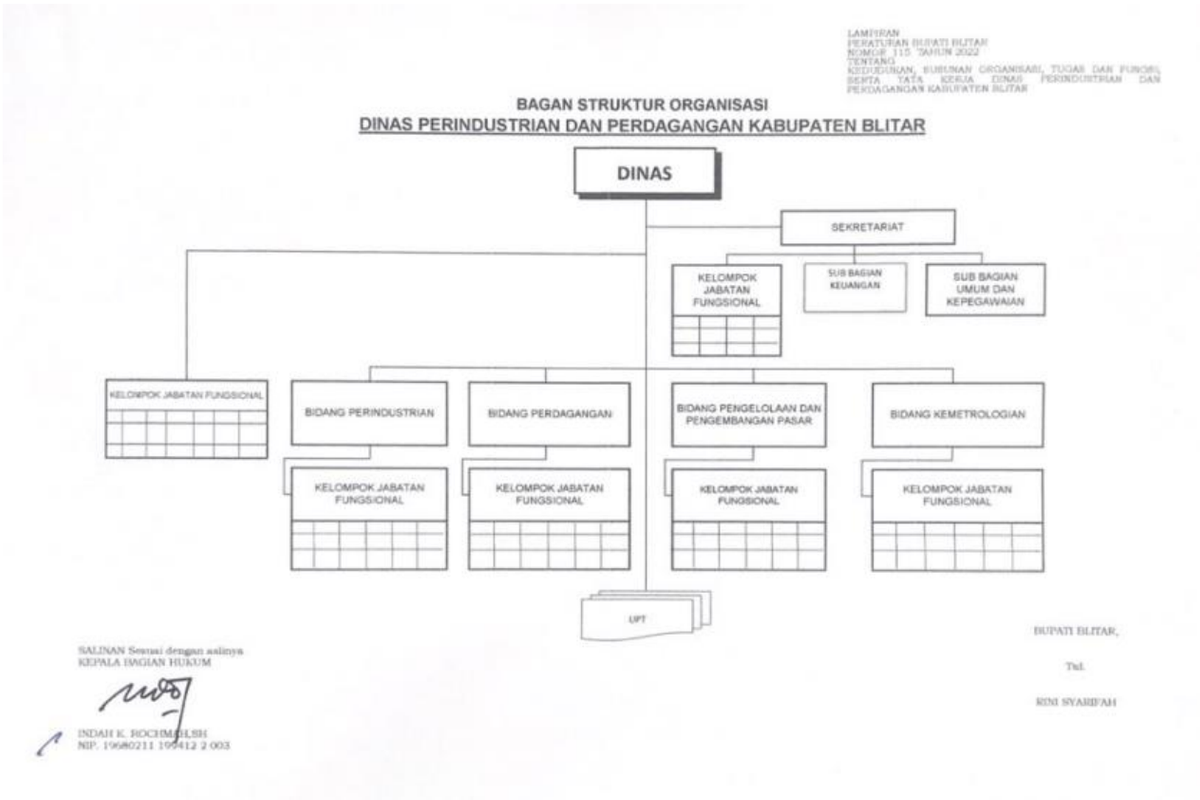
1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Jabatan Fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional dipuduki oleh Pejabat Fungsional yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan
4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam butir (3) dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
5) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam butir (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.
6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang membidangi urusan kepegawaian.

### 2.1.9 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Lampiran dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi**




Sumber: Perbup Blitar Nomor 115 Tahun 2022

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat memiliki sebanyak 50 orang pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 5 (lima) pegawai golongan I, pegawai golongan II sebanyak 14 pegawai, 20 pegawai golongan III, dan 11 pegawai golongan IV.

**Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2022**

| NO | UNIT KERJA | GOLONGAN | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat | | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 2 | Bidang Perindustrian | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Bidang Perdagangan | | | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Bidang Kemetrologian | | | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar | 5 | 10 | 3 | 1 | 19 |
| 6 | Kelompok Jabatan Fungsional | | 3 | 8 | 5 | 16 |
| 7 | UPTD | | | | | 0 |
| | JUMLAH | 5 | 14 | 20 | 11 | 50 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

Berdasarkan jenis kelaminnya, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tediri dari 70% laki-laki dan 30% perempuan.

**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

| NO | UNIT KERJA | Gol. I | | Gol. II | | Gol. III | | Gol. IV | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Sekretariat | | | 1 | | 2 | 3 | 1 | | 7 |
| 2 | Bidang Perindustrian | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 3 | Bidang Perdagangan | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | Bidang Kemetrologian | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 5 | Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar | 5 | | 8 | 2 | 3 | | | 1 | 19 |
| 6 | Kelompok Jabatan Fungsional | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 7 | UPTD | | | | | | | | | 0 |
| | JUMLAH | 5 | 0 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 | 3 | 50 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terdiri dari 30% berpendidikan S1, 19% S2, 35% SMA, 7% D3, 7% SD, dan 2% SMP. Sumberdaya yang berkualitas akan mendorong perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar di masa mendatang.

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan**

| NO | UNIT KERJA | SD | | SMP | | SMA | | D3 | | S1 | | S2 | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Sekretariat | | | | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Bidang Perindustrian | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 3 | Bidang Perdagangan | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| 4 | Bidang Kemetrologian | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 |
| 5 | Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar | 4 | | 1 | | 10 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 19 |
| 6 | Kelompok Jabatan Fungsional | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| 7 | UPTD | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | JUMLAH | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 4 | 50 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

Dalam mendukung pencapaian kinerja Program Kegiatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2022 memberdayakan 96 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang didistribusikan sebagai Tenaga Administrasi Kantor (13 orang), Tenaga Teknis Administrasi Pasar (53 orang), Petugas Kebersihan Pasar (29 orang), dan Petugas Pengamanan Pasar (11 orang).

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 80.528.924.635,81 dengan perincian sebagaimana Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**
**Rincian Aset Tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
**Kabupaten Blitar (per 31 Desember 2021)**

| NO | JENIS ASET | NILAI (Rp.) |
|---|---|---|
| | **Aset Tetap** | **80.422.922.435,81** |
| 1 | Tanah | 19.449.916.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 7.794.322.257,41 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 48.297.991.751,40 |
| 4 | Jalan, Jaringan dan Irigasi | 4.795.041.427,00 |
| 5 | Aset Tetap lainnya | 85.651.000,00 |
| 6 | KDP | 0,00 |
| | **Aset Lainnya** | **106.002.200,00** |
| 1 | Aset Tak Berwujud | 98.202.200,00 |
| 2 | Aset Lain-Lain | 7.800.000,00 |
| | **Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya** | **80.528.924.635,81** |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1. Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar 2017-2021 berdasarkan hasil pengukurannya disajikan dalam tabel 2.5. Pada tabel tersebut nampak bahwa capaian kinerja pada periode 2017-2020 hampir seluruhnya diatas 100%, kecuali capaian pertumbuhan jumlah industri pada tahun 2019 dan 2020. Capaian pada indikator pertumbuhan jumlah industri pada tahun 2020 tidak memenuhi target disebabkan oleh adanya refokusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19. Di sisi lain, dampak pandemic Covid-19 juga berimbas pada lumpuhnya industri kecil dan aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Keberhasilan realisasi capaian indikitor kinerja didukung oleh harmonisasi dan kerjasama yang efektif dari seluruh bidang dan optimalisasi potensi SDM yang ada. Selain itu, kerjasama yang efektif, baik lintas perangkat daerah maupun dengan berbagai *stakeholder* terkait turut menunjang keberhasilan berbagai program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

**Tabel 2.5**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021**
**Kabupaten Blitar**

| No | Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Target Renstra | | | | | Realisasi / Capaian Renstra | | | | | Rasio Capaian (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Ekspor Bersih Perdagangan (Juta) | 1050 | 1060 | 1070 | 1080 | 3.000 | 1.404 | 2.309 | 4.880 | 2.817 | 1.796 | 133,71 | 217,83 | 456,07 | 260,83 | 59,87 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal | 84 | 90 | 91 | 97 | 102 | 86 | 90 | 150 | 100 | 400 | 102,38 | 100,00 | 164,84 | 103,09 | 392,16 |
| 3 | Kontribusi sektor industri pengolahan thd PDRB (%) | 13 | 13,04 | 13,07 | 12,92 | 14 | 13,56 | 13,80 | 14,15 | 13,72 | 14,04 | 104,31 | 105,83 | 108,26 | 106,19 | 100,29 |
| 4 | Pertumbuhan jumlah industri (%) | 1,57 | 2,06 | 2,27 | 2,22 | 2,42 | 2,59 | 2,07 | 1,41 | 0,74 | 0,74 | 164,97 | 100,49 | 62,11 | 33,33 | 30.58 |
| 5 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 565 | 447 | 458 | 388 | 319 | 565,00 | 447,00 | 366,40 | 310,40 | 319 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2021

### 2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja yang baik. Penyerapan anggaran 2017-2020 rata-rata di atas 90%, hal ini mengindikasikan bahwa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berjalan dengan baik. Secara lebih rinci terkait kinerja keuangan dapat dlihat pada Tabel 2.6.

Capaian realisasi anggaran yang rata-rata mencapai diatas 90% menunjukkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini berdampak pada capaian indikator kinerja perangkat daerah yang sangat baik atau diatas target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan anggaran yang rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya turut mendukung capaian indikator kinerja perangkat daerah. Namun, pada tahun 2020 penyesuaian anggaran dilakukan pada pos belanja langsung, hal ini sebagai bagian dari *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, Dinas Peridustrian dan Perdagangan melakukan penyesuaian-penyesuaian program dan kegiatan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak pandemic Covid-19. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran senantiasa dilakukan untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan ditengah dinamika dan ketidakpastian pemulihan ekonomi di masa pandemic Covid-19.

## Tabel 2.6

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2017-2021

## Kabupaten Blitar

| No | Uraian Sumber Keuangan | Anggaran**) | | | | | Realisasi Anggaran | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Belanja tidak langsung | 4.594.866.790 | 4.114.405.809 | 5.526.296.984 | 5.512.710.984 | 5.791.403.578 | 4.466.890.780 | 4.080.162.436 | 5.440.035.297 | 5.401.953.812 | 5.442.375.684 | 97,21 | 99,17 | 98,44 | 97,99 | 93,97 | 7,16 | 6,18 |
| 2 | Belanja langsung | 6.957.852.300 | 19.606.669.000 | 20.780.030.670 | 9.256.983.250 | 8.929.775.941 | 6.403.130.835 | 16.162.329.669 | 17.484.573.127 | 8.123.169.547 | 8.455.743.919 | 92,03 | 82,43 | 84,14 | 87,75 | | 32,19 | 27,78 |
| | -Belanja Pegawai | 4.594.866.790 | 4.114.405.809,6 | 5.526.296.984 | 5.512.710.984 | 5.791.403.578 | 4.466.890.780 | 4.080.162.436 | 5.440.035.297 | 5.401.953.812 | 5.442.375.684 | 80,57 | 93,49 | 90,95 | 97,98 | 93,97 | 7,16 | 6,18 |
| | -Belanja Modal | 3.454.119.800 | 15.124.821.000 | 15.459.464.450 | 5.285.887.050 | 1.921.309.500 | 3.090.868.000 | 12.056.230.922 | 12.636.913.599 | 4.225.248.650 | 1.910.743.800 | 89,48 | 79,71 | 81,74 | 79,93 | 99,45 | 52,65 | 43,38 |
| | -Belanja Barang & Jasa | 3.340.542.500 | 4.368.798.000 | 5.159.036.220 | 3.776.321.200 | 7.008.466.441,5 | 3.180.777.835 | 4.000.408.747 | 4.700.744.528 | 3.707.070.897 | 6.545.000.119 | 95,22 | 91,57 | 91,12 | 98,17 | 93,39 | 26,91 | 24,67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Belanja Operasi (2021) | 8.098.599.290 | 8.596.253.809,60 | 10.846.863.204 | 9.483.807.184 | 12.799.870.019,5 | 7.779.153.615 | 8.186.261.183 | 10.287.694.825 | 9.299.874.709 | 11.987.375.803 | 96,05 | 95,23 | 94,84 | 98,06 | 93.65 | 13,68 | 12,55 |
| 4 | Belanja Modal (2021) | 3.454.119.800 | 15.124.821.000 | 5.459.464.450 | 5.285.887.050 | 1.921.309.500 | 3.090.868.000 | 12.056.230.922 | 12.636.913.599 | 4.225.248.650 | 1.910.743.800 | 89,48 | 79,71 | 81,74 | 99,45 | 0,38 | 52,65 | 43,38 |
| 5 | Belanja Tak Terduga | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Belanja Transfer | | | | | - | | | | | | | | | | | | |

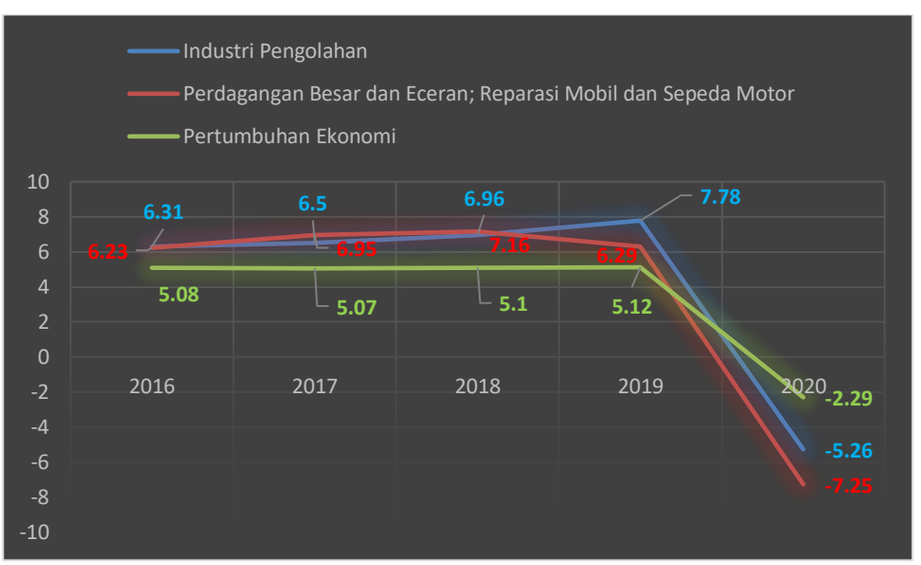
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

### 2.3.3. Kinerja Sektor Industri dan Perdagangan

**a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan**

Sector industry pengolahan dan sektor perdagangan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar. Selama periode 2016-2019 (kondisi normal), pertumbuhan kedua sector tersebut selalu di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar. Rata-rata pertumbuhan kedua sector tersebut mampu diatas 6%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada kisaran 5%. Namun, perlambatan perekonomian yang terjadi pada tahun 2020 karena dampak pandemic covid-19 membuat pertumbuhan sektor industri dan sektor perdagangan terkontraksi cukup dalam, yaitu -5,26% dan -7,25%.

**Gambar 2.2**
**Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan (%)**



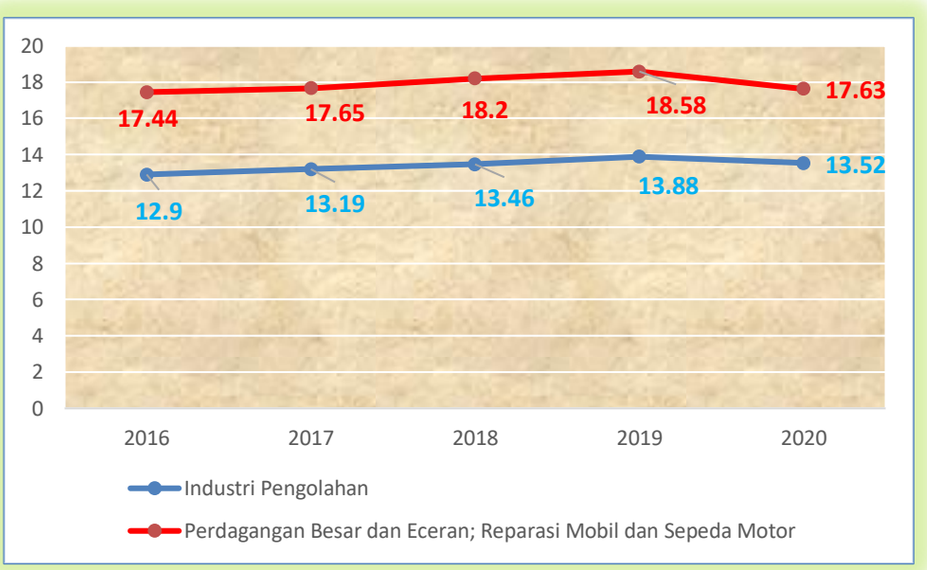

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, diolah 2021

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang membatasi mobilitas sumberdaya produksi dan sumberdaya manusia berpengaruh pada aktivitas industri dan perdagangan. Disisi lain, pelemahan daya beli masyarakat sepanjang 2020 karena sebagian masyarakat menurun pendapatannya semakin membuat kedua sektor strategis tersebut terkontraksi yang cukup dalam. Seiring dengan perkembangan penanganan pandemic Covid-19 yang baik dan masifnya program vaksinasi di tahun 2021 diharapkan memberikan angin segar pada sektor industri dan sektor perdagangan untuk kembali menjadi motor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar di era *new normal*.

**b. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**

Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Kabupatan Blitar. Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB memiliki *trend* kenaikan dari tahun ke tahun, dimana rata-rata kontribusinya pada PDRB pada kisaran 17%. Demikian halnya dengan sektor industri pengolahan yang memiliki rata-rata kontribusi pada PDRB pada kisaran 13%. Trend kenaikan kontribusi kedua sektor tersebut sedikit melemah di tahun 2020, karena kedua sektor tersebut mengalami tekanan yang cukup besar, dan di era pandemic yang menjadi *champion* adalah sektor pertanian dan sektor informasi dan komunikasi.

**Gambar 2.3**
**Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)**

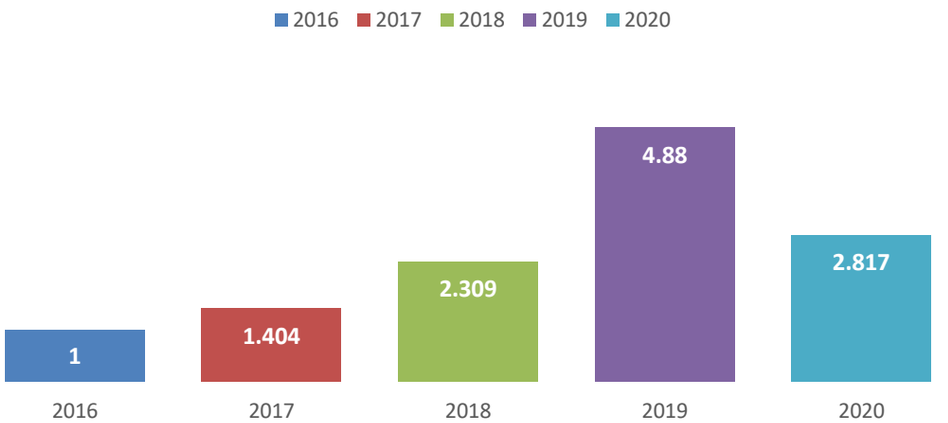



*Sumber: BPS Kabupaten Blitar, diolah 2021*

**c. Ekspor Bersih Perdagangan**

Ekspor perdagangan bersih Kabupaten Blitar bergerak menanjak secara konsisten dan signifikan sepanjang periode pembangunan sebelumnya. Terhitung sepanjang 2016-2019, peningkatan pertumbuhan ekspor perdagangan bersih adalah sebesar 4 kali lipat. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,817%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19 yang membuat terhambatnya distribusi dan logistic barang.

**Gambar 2.4**
**Ekspor Bersih Perdagangan (%)**

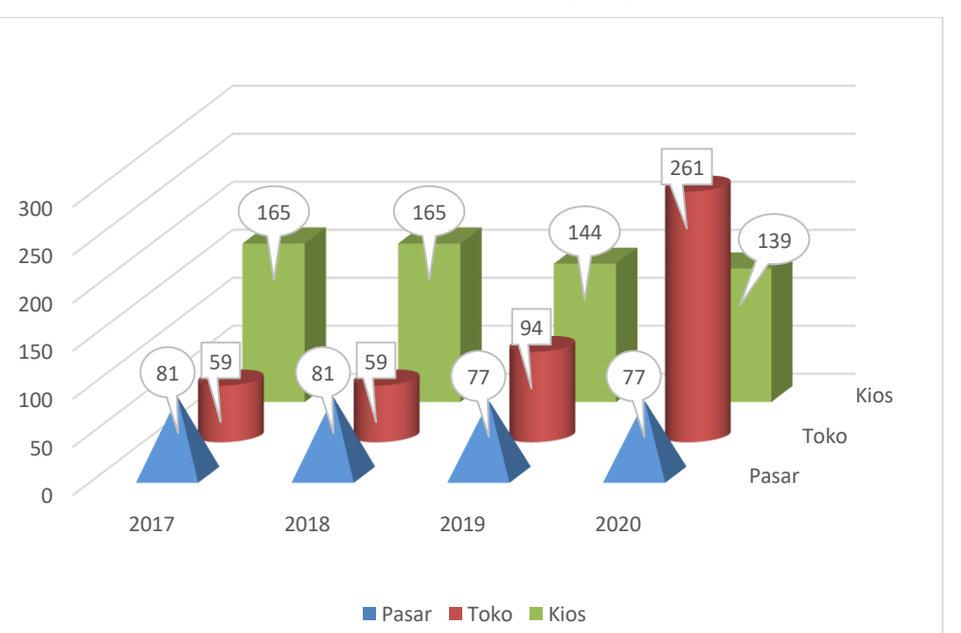



Sumber: Data diolah, 2021

**d. Perkembangan Jumlah Industri dan Sarana Perdagangan**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa Jenis Sarana Perdagangan yang terdaftar terdapat kios, toko, dan pasar. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 139 kios, angka ini menurun dibandingkan tahun 2018 maupun 2019, hal ini mengindikasikan sebagai dampak adanya pandemic Covid-19. Kondisi ini juga terjadi pada pasar, dimana pada tahun 2020 jumlah pasar juga sedikit menurun menjadi 77 Pasar dibandingkan tahun 2018 yang terdapat 81 pasar. Sementara itu, peningkatan cukup signifikan terjadi pada jumlah toko, dimana pada tahun 2020 jumlah toko sebanyak 261 unit, meningkat sangat tajam dibandingkan tahun 2019 yang hanya 94 toko. Dengan semakin banyaknya toko, diharapkan sektor perdagangan akan terus mengalami pertumbuhan yang pesat di masa mendatang.

**Gambar 2.5**
**Jenis Sarana Perdagangan**




Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Kabupaten Blitar memiliki pasar dengan tipe A sebanyak 4 pasar, yaitu Pasar Wlingi, Kademangan, Lodoyo, dan Srengat. Untuk tipe Pasar B terdapat pasar Kesamben dan Kanigoro. Kemudian, untuk pasar tipe C terdapat Pasar Garum, sedangkan untuk tipe Pasar D ada di Pasar Talun, Nglegok, dan Sidorejo. Pasar sebagai salah satu pusat perekonomian lokal di tingkat kecamatan dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur seberapa besar potensi dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan pasar ke depan sebagai salah satu pusat transaksi ekonomi perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, bersih, nyaman dan sehat. Selain itu, kondisi pasar yang baik akan dapat bersaing dengan para kompetitor seperti ritel dan swalayan.

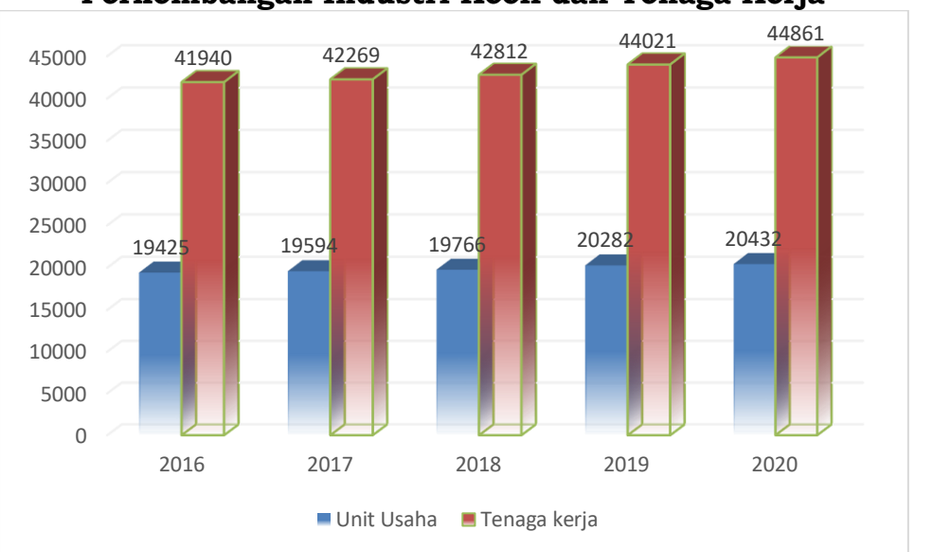
**Tabel 2.5**
**Profil Pasar di Kabupaten Blitar**

| No | Nama Pasar | Kecamatan | Jumlah Pedagang | Tipe Pasar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WLINGI | Wlingi | 1500 | A |
| 2 | KADEMANGAN | Kademangan | 597 | A |
| 3 | LODOYO | Sutojayan | 544 | A |
| 4 | SRENGAT | Srengat | 535 | A |
| 5 | KESAMBEN | Kesamben | 369 | B |
| 6 | KANIGORO | Kanigoro | 365 | B |
| 7 | GARUM | Garum | 215 | C |
| 8 | TALUN | Talun | 212 | D |
| 9 | NGLEGOK | Nglegok | 140 | D |
| 10 | SIDOREJO (PATOK) | Ponggok | 118 | D |
| 11 | DOKO | Doko | 51 | - |
| 12 | NGEMBUL | Ngembul | 48 | - |
| 13 | GANDUSARI | Gandusari | 17 | - |
| Jumlah | | | 4.711 | - |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Blitar
Keterangan: Tipe Pasar Sesuai Permendag Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017

Tipe A : Jumlah Pedagang paling sedikit 400 orang dan luas lahan paling sedikit 5.000 m²
Tipe B : Jumlah Pedagang paling sedikit 275 orang dan luas lahan paling sedikit 4.000 m²
Tipe C : Jumlah Pedagang paling sedikit 200 orang dan luas lahan paling sedikit 3.000 m²
Tipe D : Jumlah Pedagang paling sedikit 100 orang dan luas lahan paling sedikit 2.000 m²

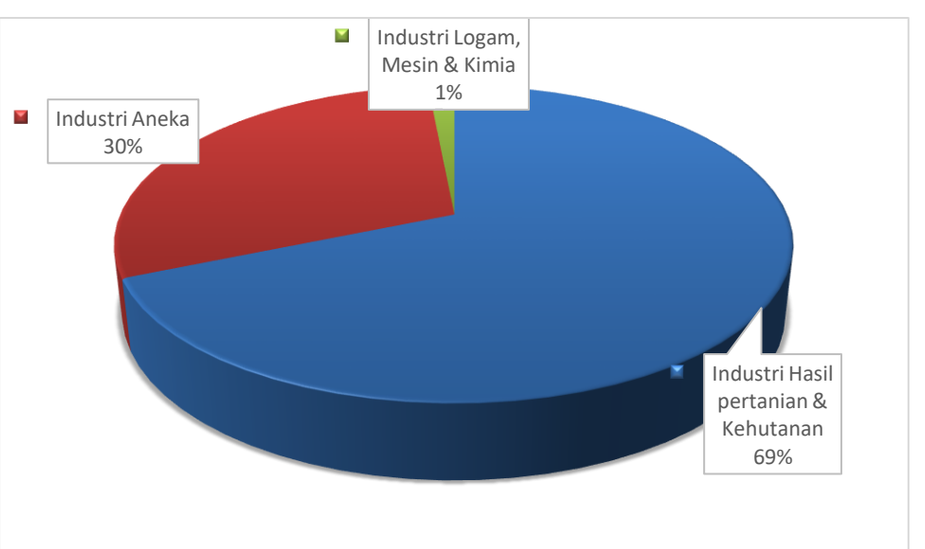
**Gambar 2.6**
**Perkembangan Industri Kecil dan Tenaga Kerja**




Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Jumlah industri kecil di Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat 19.425 industri kecil dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 20.432 industri kecil atau terjadi peningkatan sebesar 4,9% selama kurun waktu 2016-2020. Sedangkan tenaga yang terserap juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 tenaga yang terserap sebanyak 41.940 orang dan pada tahun 2020 sebesar 44.861 orang atau mengalami peningkatan sebesar 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri semakin berkembang dan dapat menjadi sumber lapangan kerja.

**Gambar 2.7**
**Jenis Industri Kecil Tahun 2020**



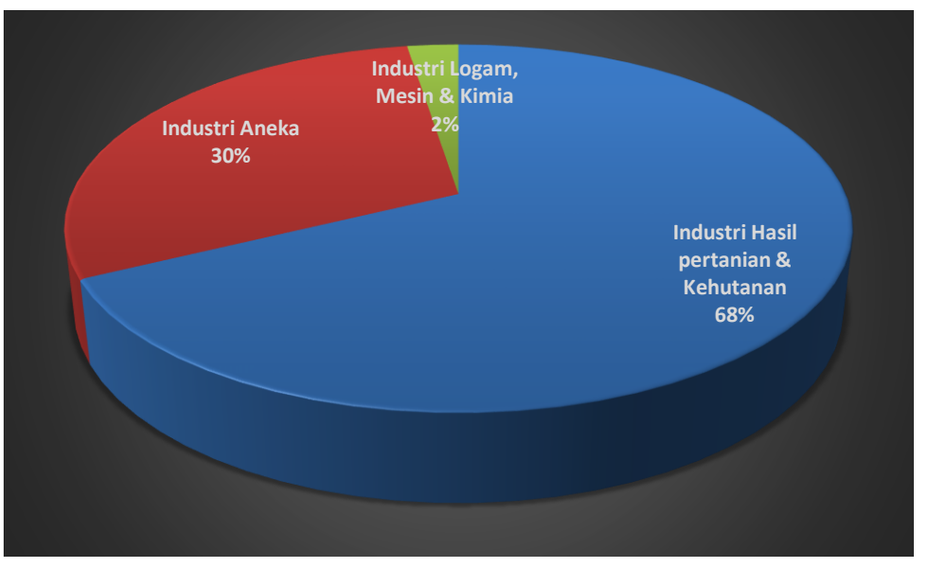

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Pada tahun 2020 jenis industri kecil di Kabupaten Blitar terbanyak adalah industri hasil pertanian dan kehutanan yang mencapai sekitar 69% atau sebanyak 14.032 unit, kemudian industri aneka sebanyak 30% (6.094 unit) dan industri logam, mesin & kimia sekitar 1% (306 unit). Industri pertanian & kehutanan dan industri aneka jumlahnya sangat besar sesuai dengan

karakteristik perekonomian Kabupaten Blitar yang ditopang oleh sektor pertanian, sehingga *linkage* sektor pertanian dan industri perlu terus ditingkatkan.

**Gambar 2.8**

**Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja per Jenis Industri**

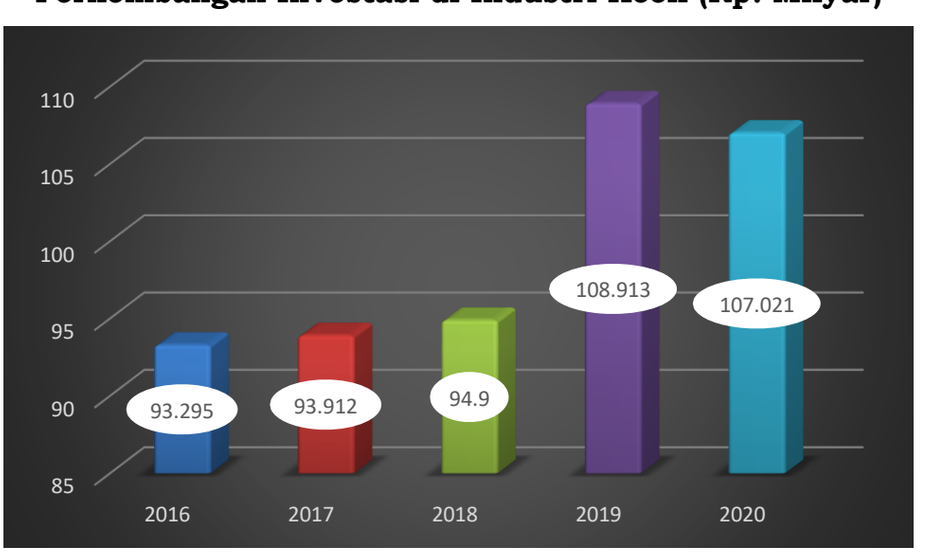



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Sementara itu, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja di masing-masing jenis industri pada tahun 2020, maka penyerapan tenaga terbesar di industri hasil pertanian & kehutanan yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 68% (30.383 orang) dari total tenaga kerja di sektor industri. Sedangkan industri aneka mampu menyerap tenaga kerja sebesar 30% (23.350 orang) dan industri logam, mesin & kimia menyerap tenaga kerja sebesar 2% (306 orang). Sektor industri sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, oleh karena pengembangan sektor industri perlu mendapat perhatian yang lebih serius dalam upaya perluasan lapangan kerja.

**Gambar 2.9**

**Perkembangan Investasi di Industri Kecil (Rp. Milyar)**

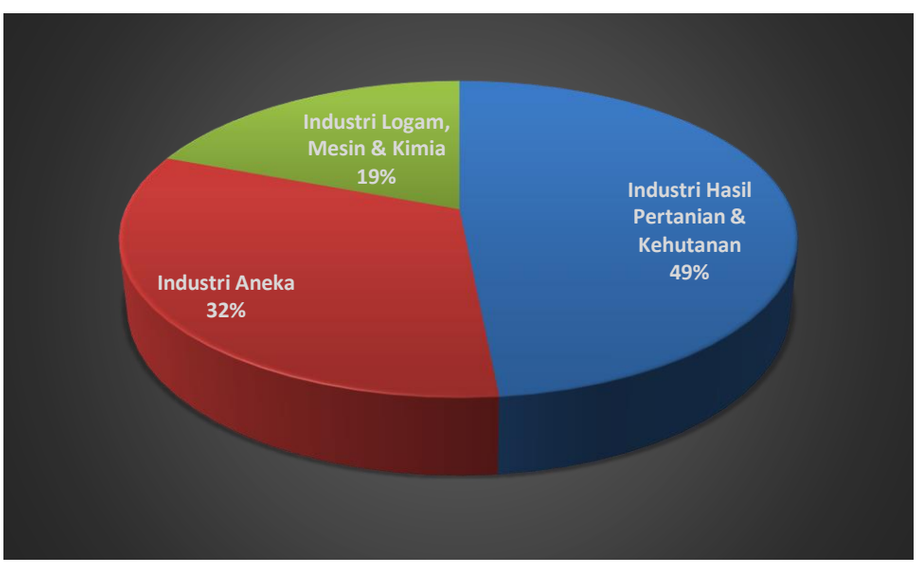



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Investasi di industri kecil dari tahun 2016-2019 mengalami *trend* kenaikan, pada tahun 2016 investasi mencapai Rp. 93,295 Milyar dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp.108,913 Milyar. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, dimana pada tahun 2020 investasi mencapai Rp.107,021 Milyar atau turun sekitar 1,8%. Penurunan ini sebagai dampak dari kondisi pandemi Covid-19 yang mulai sejak maret 2020.

**Gambar 2.10**

**Proporsi Investasi di Jenis Industri Kecil**




Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021

Pada tahun 2020, sebaran investasi di industri kecil paling besar terdapat di Industri Pertanian dan Kehutanan yang mencapai sekitar 49% atau sekitar (Rp. 51,855 Milyar). Sedangkan industri aneka menyerap investasi sebesar 32% (Rp.34,619 Milyar) dan industri logam, mesin & kimia menyerap investasi sebesar 2% (Rp. 19,20 Milyar). Industri hasil pertanian & kehutanan dan industri aneka menjadi daya tarik investor, oleh karena itu kedua industri tersebut harus terus dikembangkan dengan berbagai program dan insentif fiskal.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

**A. Tantangan Bidang Perindustrian**

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar di bidang perindustrian di masa mendatang antara lain:

1. Perlunya meningkatkan industri berbasis sumberdaya lokal dengan peningkatantan *linkages* antara sektor pertanian (sebagai sumber bahan

baku) dengan sektor industri (sebagai industri pengolah), hal ini akan memberikan nilai tambah pada perekonomian.

2. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan akses pemasaran melalui jejaring media sosial, *e-commerce* dan teknologi informasi menuntut industri kecil untuk cepat beradapatasi dalam proses produksi, sistem pemasaran, dan standarisasi produk. Dalam hal ini dibutuhkan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan industri kecil melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kerjasama penyediaan bahan baku, pemasaran dan permodalan serta perijinan.
3. Perlunya mendorong peningkatan kewirausahaan dalam upaya mencetak wirausaha baru. Hal ini dapat didorong dengan menambah materi kewirausahaan sejak pendidikan usia dini. Selain itu, peningkatan *link and match* dan kurikulum pelatihan tenaga kerja yang *market friendly* perlu terus ditingkatkan.
4. Gejolak ekonomi dan ketidakpastian akibat pandemic covid-19 serta proses pemulihan ekonomi ke depan yang masih diperkirakan akan mengalami perlambatan akan berdampak pada pemulihan sektor industri, dimana kinerja industri selama tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup dalam.

**B. Tantangan di Bidang Perdagangan**

1. Pengembangan pasar rakyat yang baik secara fisik (fasilitas), pengelolaan, bersih, sehat, dan aman menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk dapat bersaing dengan pesatnya ritel.
2. Penataan kawasan perlu dilakukan untuk menata potensi PKL menjadi bagian dalam integrasi dengan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Kerjasama perdagangan antar daerah perlu terus dilakukan untuk memperluas pasar produk Kabupaten Blitar.
4. Pengawasan distribusi barang pokok menjadi sangat penting guna memastikan ketersedian dan harga bahan pokok terjangkau serta terkendali sehingga gejolak harga bahan pokok tidak akan fluktuatif di tingkat masyarakat.
5. Pengetatan perizinan dan pengawasan waralaba perlu ditingkatkan untuk menjaga eksistensi pasar rakyat dan toko tradisional yang dikelola oleh masyarakat.

### 2.4.2. Peluang di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

#### A. Peluang Bidang Perindustrian

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk pengembangan bidang perindustrian di masa mendatang antara lain:

1. Pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk melalui "rumah digital" untuk dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual produk-produk lokal, hal ini harus dimanfaatkan secara optimal .
2. Layanan *e-commerce* dan kemajuan *startup* serta *platform marketplace* memberikan kemudahan bagi usaha di daerah untuk memperluas pasar dan jejaring pemasaran maupun penyedian bahan baku.
3. Layanan perijinan yang semakin mudah dijangkau dan diakses diharapkan akan mendorong industri-industri kecil untuk berbadan hukum dan stadardisasi produknya meningkat melalui kemudahan hak paten, merk dagang, dan sertifikasi halal.
4. Kabupaten Blitar yang melimpah bahan baku dari produk sektor pertanian dapat menjadi peluag dalam pengembangan agro industri maupun agrobis sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomain lokal.
5. Ruang dan dukungan yang besar terhadap industri kreatif oleh pemerintah pusat diharapakan akan mendorong pertumbuhan wirausaha baru melalui pengembangan industri kreatif di daerah.

#### B. Peluang di Bidang Perdagangan

1. Revitalisasi pasar rakyat dapat memberikan peluang yang besar bagi pengembangan perdagangan dengan mengintgrasikan dan mengkolaborasikan berbagis sumberdaya, khususnya teknologi informasi .
2. Industri gastronomi (kuliner) yang semakin pesat dapat dikelola dengan baik, dengan model pendestrian (kluster) sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata.
3. Pandemic covid-19 menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan basis pertanian relatif lebih mampu bertahan perekonomiannya, oleh karena itu Kabupaten Blitar memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah, khususnya untuk produk pertanian dan produk unggulan lainnya.

4. Aksesibilitas yang semakin baik (infrastruktur jalan) akan semakin memperlancar arus logistik sehingga hal ini akan memberikan peluang peningkatan volume perdagangan di Kabupaten Blitar.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Pemetaan permasalahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan digambarkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| ***Bidang Perindustrian*** | | |
| Rendahnya produktivitas industri | Kurang optimalnya sentra industri pengolahan untuk produk-produk unggulan daerah | *Linkages* sector industry dengan sector lainnya yang relatif rendah |
| | Kurang optimalnya perencanaan dan dukungan data/informasi industri | kurang optimalnya sistem informasi dan *updating* data industri |
| | | Kurang optimalnya perumusan kebijakan pengembangan industri |
| | Kurang optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri | Produk Indusri Kecil masih banyak yang belum memenuhi standardisasi |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk industry kecil |
| | | Lemahnya penerapan teknologi tepat guna bagi industri kecil |
| ***Bidang Perdagangan*** | | |
| Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Kontribusi Terhadap PDRB Melambat | Perluasan pasar produk yang kurang optimal | Kurang optimalnya penggunaan produk-produk daerah dalam aktivitas pemerintahan dan msyarakat |
| | | Kurang optimalnya pengendalian barang impor |
| | | Kurang optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan antar daerah |
| | | Tingginya biaya distribusi dan logistik |
| | | Kurang optimalnya fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha perdagangan |
| | | Fluktuasi harga barang pokok dan penting |
| | | Kualitas infrastruktur pasar di tingkat Kecamatan yang kurang memadai |
| | Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga | Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar |
| | | Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib |

| Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|
| | | niaga |
| | Belum optimalnya standardisasi mutu barang | Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi |

## 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana diketahui visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026 adalah: **"***Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)"*.

Visi diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) misi berikut:

1. **Misi 1:** Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. **Misi 2:** Meningkatkan taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. **Misi 3:** Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. **Misi 4**: Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengemban tugas untuk tercapainya Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Misi 3 yakni **"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"**, dimana misi ini memuat tujuan "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas" yang dibentuk dari sasaran pembangunan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa.
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Adapun Misi 4, yakni "Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah

dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan". Tujuan dari misi keempat ini adalah "*Meningkatnya daya saing ekonomi inklusif, mandiri dan berkelanjutan*", dengan indikator "Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, dan Indek Kepuasan Layanan Infrastruktur", yang selanjutnya diturunkan ke dalam 3 (tiga) sasaran, yaitu:

a. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarakat.
b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah .

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, sasaran dan indikator target dari tujuan misi keempat tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

*a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.*

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan pengembangan industri berbasis agro. Pengembangan Industri kecil harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Kabupaten Blitar merupakan industry Kecil. Pengembangan industri berbasis agro dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian.

*b. Pembangunan industri dan perdagangan yang mandiri*

Pada bidang industri, kemandirian ekonomi diwujudkan dengan mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada bidang perdagangan, kemandirian tersebut diupayakan melalui penguatan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kerjasama perdagangan dengan pemerintah daerah lain melalui kontrak kerjasama, khusunya kerjasama perdagangan komoditas pertanian dan peternakan.

*c. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi*

Daya saing sektor industri dan perdagangan Kabupaten Blitar harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional.

Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan Kabupaten Blitar dalam integrasi ekonomi pada tingkat regional, nasional, dan global.

*d. Pembangunan Industri dan Perdagangan yang Berkelanjutan*

Pembangunan industry dan perdagangan yang berkelanjutan dimaksudkan bahwa pembangunan industry dan perdagangan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sumber daya alam, dan mengoptimalkan potensi local secara berkesinambungan. Upaya pembangunan industry dan perdagangan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam setiap periodesasi pembangunan.

**Tabel 3.2**

**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati**

| **Visi :** Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur) | | | |
|---|---|---|---|
| **Misi** | **Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih** | **Faktor Penghambat** | **Faktor Pendorong** |
| Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan | 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>2. Program Pengembangan Ekspor<br>3. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri | 1. *Linkages* sector industry dengan sector pertanian yang masih relative rendah.<br>2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses produksi dan pemasaran produk bagi industry mikro dan kecil<br>3. Standarisasi produk industry mikro dan kecil yang masih terbatas.<br>4. Pembangunan sentra-sentra industry yang kurang terintegrasi dengan sumberdaya | 1. Digitalisasi ekonomi yang semakin pesat mendorong perluasan pasar bagi produk industry.<br>2. Aksesibilitas dan konektivitas antar daerah yang semakin baik memudahkan dalam arus logistic barang dan jasa.<br>3. Keberpihakan kepala daerah pada industry mikro dan kecil yang berkelanjutan.<br>4. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penggunaan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | produksi lainnya.<br>5. Kurangnya Kerjasama dengan perguruan tinggi dan swasta dalam penerapan teknologi tepat guna.<br>6. Recovery perekonomian akibat pandemic Covid-19 yang masih lambat | produk dalam negeri dan berbagi stimulus peningkatan daya beli melalui jaring pengaman sosial. |

## 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait

### *3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024*

Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut: "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Kemudian, dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 - 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di sektor perdagangan.

Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan.

**Tabel 3.3**
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perdagangan Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan**

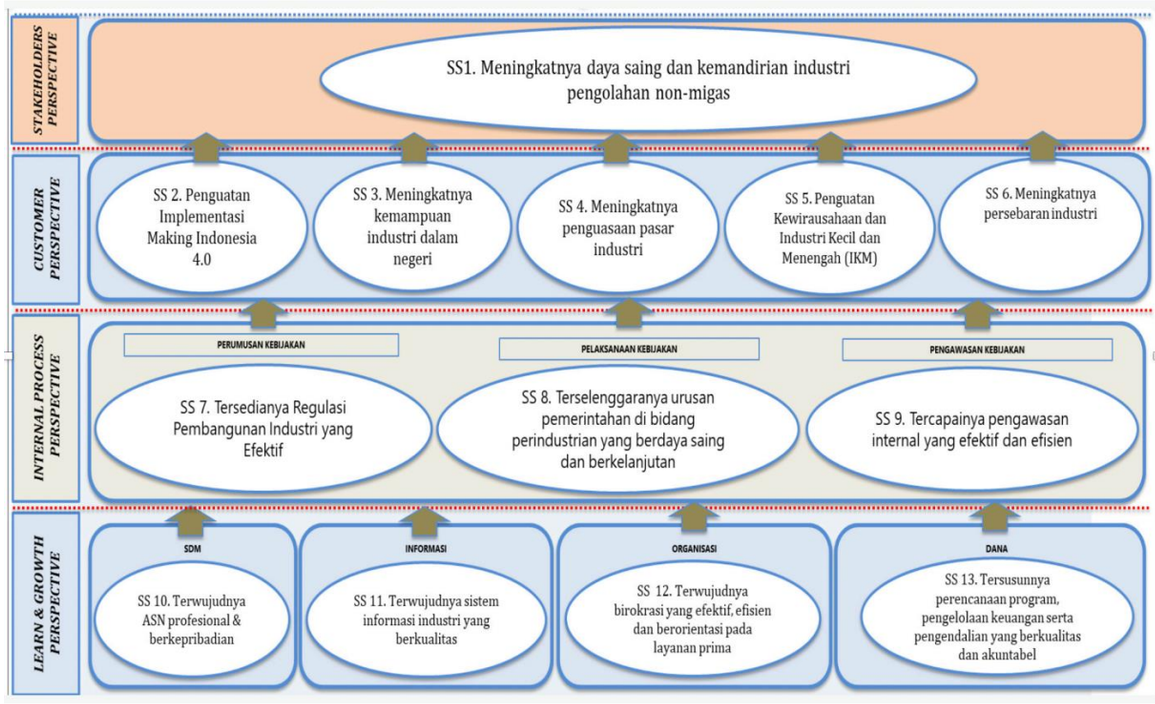
| Tujuan | Sasaran Renstra K/L | Indikator Tujuan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa | 1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; | Neraca Perdagangan (USD Miliar) | Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan | Perluasan pasar produk melalui teknologi informasi |
| 2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi | 2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; | Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%) | Kemampuan pengendalian fluktuasi harga yang masih kurang | Mulai dibangunnya system informasi harga bahan pokok dan penting |
| | 3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; | | Pengawasan dan edukasi yang kurang optimal dalam peredaran barang yang kurang terstandarisasi | Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan edukasi/sosialisasi |
| | 4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri; | | Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan | Perluasan pasar produk melalui teknologi informasi |
| | 5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK; | | Belum adanya system resi gudang | Potensi lembaga pembiayaan dengan tingkat bunga rendah |
| 3. Terwujudnya tata kelola pe merintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas | 6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan profesional; | Indeks Reformasi Birokrasi | Kurangnya *upgrading* SDM | Pemanfaatan *smartcity* dan teknologi informasi dalam *e-planning, e-budgeting,* e-monev |
| | 7. Meningkatnya kapabilitas SDM perdagangan. | | Masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM | Internalisasi renumerasi, berbasis kinerja, dan kompetensi |

### 3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024

Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri periode 2020-2024 yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional".** Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 6 (enam) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC*) yang dibagi dalamempat perspektif, yakni *stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective.*

Pada peta strategi Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat Eselon II, unit pelaksana teknis, dan unit pendidikan).

**Gambar 3.1. Peta Strategi Kementerian Perindustrian**




Sumber: Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

**Tabel 3.4**
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian**

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Renstra K/L | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional** | 1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)<br>2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)<br>3. Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)<br>4. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US$ Miliar) | 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Non-migas" | Masih perlunya dukungan infrastruktur ekonomi, kualitas SDM pelaku industry | Pembangunan infratruktur untuk peningkatan aksesibilitas dan konektifitas, fasilitasi kemudahan pembiayaan, berbagai insentif untuk industry kecil |
| | | 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 | Belum semua industry kecil melek teknologi | Semakin luasnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat |
| | | 3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri; | Produktivitas masih kurang | Kemudahan dalam mencari tenaga kerja, pembiayaan, dan ketersedian bahan baku |
| | | 4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri; | Masih kurangnya promosi dan kerjasama industry untuk pasar produk | Integrasi teknologi informasi untuk perluasan promosi dan perluasan pasar |
| | | 5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM; | Kurangnya kewirausahaan | Internalisasi kewirausahaan dalam pendidikan sejak dini |
| | | 6. Meningkatnya Persebaran Industri | Kurang optimalnya sentra-sentra industry | Dukungan kebijakan yang semakin besar dalam paradigma pembangunan berbasis sentra industri |
| | | 7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif | Kurangnya perencanaan dan pengawasaan yang efektif | Kerjasama dengan berbagai pihak yang semakin luas dalam perencanaan pembangunan industry |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Renstra K/L | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| | | 8. Terselenggara nya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | Kualitas SDM perencana dan pelaksana yang masih perlu dilakukan *upgrading* secara berkala | Kompetensi SDM yang semakin meningkat |
| | | 9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | | |
| | | 10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian | | |
| | | 11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas | Terbatasnya *updating* database industri | Integrasi system informasi industri |
| | | 12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | Penerapan GCG yang masih belum optimal | Kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang semakin meningkat |
| | | 13. Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel | Kualitas SDM perencana dan pelaksana yang masih perlu dilakukan *upgrading* secara berkala | Kompetensi SDM yang semakin meningkat dan *rewards* |

## 3.4. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Misi ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 adalah **"**Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah**".** Misi pertama ini memuat tujuan "*Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah*", yang diukur dengan indikator "Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini". Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)"
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan, dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%)"

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan;
2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri;
3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri;
4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

**Tabel 3.5**
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, terhadap Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur**

| Tujuan | Sasaran Renstra Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Jawa Timur | Indikator Tujuan/Sasaran | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Nilai Tambah Produksi | 1. Meningkatnya PDRB sektor industri pengolahan; | Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%) | Masih perlunya dukungan infrastruktur ekonomi, kualitas SDM pelaku industry | Pembangunan infratruktur untuk peningkatan aksesibilitas dan konektifitas, fasilitasi kemudahan pembiayaan, berbagai insentif untuk industry kecil |
| | | Nilai PDRB industri pengolahan (Triliun Rp) | | |
| Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan | | Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi (%) | | |
| | 2. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri; | Persentase pertumbuhan net ekspor non migas (%) | Masih kurangnya promosi dan kerjasama industry dan kerjasama antar daerah untuk pasar produk | Integrasi teknologi informasi untuk perluasan promosi dan perluasan pasar |
| | 3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri; | Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah (%) | | |

| Tujuan | Sasaran Renstra Dinas Perindustrian & Perdagangan Prov. Jawa Timur | Indikator Tujuan/Sasaran | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---|---|---|---|
| | 4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar | Pengawasan dan edukasi yang kurang optimal dalam peredaran barang yang kurang terstandardisasi | Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan edukasi/sosialisasi |
| | 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Nilai sistem akuntabiltas kinerja instansi pemerintah | Kualitas SDM perencana dan pelaksana yang masih perlu dilakukan *upgrading* secara berkala | Kompetensi SDM yang semakin meningkat dan *rewards* |

## 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### *3.5.1. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Blitar*

Dalam RTRW Kabupaten Blitar, dicanangkan pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial; pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial; pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan; pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten; mengembangkan sentra produksi peternakan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan, khususnya pada kawasan perdesaan yang potensial. Dalam hal ini RTRW Kabupaten Blitar menjadi acuan dalam meningkatkan *linkage* antara sektor pertanian dengan sector industri. Di dalam RTRW juga disebutkan perwujudan pengembangan kawasan industri yang meliputi:

a. penetapan batas kawasan peruntukan industri;
b. penetapan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
c. penyusunan masterplan industri;
d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
e. pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
f. pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu; dan
g. pembangunan infrastruktur pendukung industri dan pergudangan.

Sedangkan di sektor perdagangan, di dalam RTRW disebutkan bahwa strategi Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu, diantaranya: (1) diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, industri dan perdagangan; dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya; dan (2) meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.

Pembangunan pusat perdagangan skala kecamatan, meliputi:

1. pengembangan pasar;
2. pembangunan pertokoan/ruko;
3. pembangunan SPBU.
4. pengembangan showroom;

5. pengembangan minimarket;
6. pengembangan apotek;
7. pengembangan rumah makan/restoran;

Pembangunan pusat perdagangan, meliputi:

1. pengembangan pasar desa;
2. pengembangan pertokoan;
3. pengembangan Apotek; dan
4. pengembangan warung/rumah makan/restoran.

### *3.5.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan perindustrian dan perdagangan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

## 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis pada sub bab 2.3 – 2.4 dan sub bab 3.1 – 3.4 ditentukan beberapa isu strategis di bidang perindustrian dan perdagangan dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

a. Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri

   Perencanaan pembangunan dan pengembangan industry perlu dikaji ulang agar lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kontribusi sector industry dalam perekonomian, baik dalam kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan *branding* daerah.

b. Revitalisasi pasar rakyat

   Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dikembangkan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat, peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD.

c. Optimalisasi perlindungan konsumen

   Hal ini dilakukan melalui uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan penting.

d. Peningkatan kerjasama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta

   Peningkatan kerjasama perdagangan dan industri diharapkan dapat memperluas pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan *e-commerce*. Hal ini perlu didukung dengan data industri dan perdagangan terkini yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai upaya mendukung Visi Kepala Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengusung 2 Misi. Yang pertama adalah Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yakni **"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"**, dimana misi ini memuat tujuan "Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas" yang dibentuk dari sasaran pembangunan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa.
b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework yang disajikan pada Gambar 4.1 dibawah ini.

**Gambar 4.1 Cascading Misi 3**




Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

Kedua, Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 yaitu **"Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan".** Misi keempat ini memuat tujuan

“Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan”. Adapun sasaran pembangunan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Daya Beli Masyarkat.
b. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Perekonomian yang Berkelanjutan.
c. Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah.

**Gambar 4.2 Cascading Misi 4**




Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar lima tahun ke depan (2021-2026) adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
**Kabupaten Blitar**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | SATUAN | KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD | | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah | | a. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | -7,24 | 5,83 | 4,61 | 12,04 | 6,73 | 6,82 | 6,60 | 6,60 |
| | | | b. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan | % | -5,26 | 5,45 | 4,14 | 15,04 | 7,82 | 8,11 | 7,47 | 7,47 |
| | | 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai dan Predikat SAKIP | Nilai | 82,77 | 76,42 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | | | Predikat | A | BB | B | A | A | A | A | A |
| | | 2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan | PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) | Miliar Rupiah | 4.509,51 | 4.772.54 | 4.662,83 | 4.963,12 | 5.285,72 | 5.631,94 | 6.003,65 | 6.003,65 |
| | | 3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan | a. Pertumbuhan Industri | % | 0,74 | 11,4 | 9,39 | 2,00 | 2,36 | 2,69 | 3,00 | 3,00 |
| | | | b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas | % | -0.01 | -0,05 | 14,29 | 0,65 | 0,77 | 0,89 | 1,00 | 1,00 |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan, tantangan, peluang, serta isu strategis yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang kemungkinan akan menentukan kinerja pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan Perindustrian dan Perdagangan, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 tahun mendatang. Selain itu, dengan memperhatikan prioritas nasional Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan juga Provinsi Jawa Timur, serta perwujudan visi dan misi RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar periode 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Visi: **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan** | | | |
| Misi 3 : **Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | 1. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM<br>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas data sektoral<br>3. Peningkatan sarana prasarana kantor<br>4. Penguatan regulasi | 1. Pelaksanaan Bimtek dan Diklat ASN<br>2. Pengusulan rekrutmen ASN<br>3. Pelaksanaan survey, verifikasi dan validasi data sektoral<br>4. Penyusunan kebijakan teknis yang mendukung tercapainya tujuan PD |
| Misi 4 : **Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Inovasi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan** | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 2. Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah | 1. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan | 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan industry berbasis Kawasan dan potensi local | 1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
| | | 2. Peningkatan sistem informasi industry yang terintegrasi | 1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |
| | | 3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan izin usaha Industri | 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1. Meningkatnya Kinerja Perdagangan | 1. Revitalisasi pasar rakyat | 1. Optimalisasi reviltalisasi pasar rakyat |
| | | 2. Peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat antara pasar rakyat, toko tradisional dan ritel | 2. Peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan |
| | | 3. Peningkatan pengawasan distribusi barang, kecukupan ketersediaan barang, dan intervensi pengendalian harga | 1. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota<br>2. Peningkatan sarana distribusi perdagangan<br>3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |
| | | 4. Peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk lokal | 1. Pengembangan ekspor dan pasar dalam negeri. |
| | | 5. Peningkatan perlindungan dan layanan konsumen | 1. Peningkatan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait dengan urusan Industri dan Perdagangan Kabupaten Blitar, maka ditetapkan program-program sebagai berikut:

## 6.1. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 terdiri dari beberapa program sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;
   b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:
   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah;
   b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar;
   c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah.
4. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

**6.2. Urusan Perindustrian**

Urusan Perindustrian di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 terdiri dari beberapa program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan sebagi berikut:
   a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

**6.3. Program Penunjang**

Urusan Perdagangan di dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Rencana program dan kegiatan, beserta indikator kinerja disertai pendanaannya secara rinci disajikan pada Tabel 6.1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.

# Tabel 6.1
# Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026
# Kabupaten Blitar

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | - Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 103,33 | 100 | 10.311.419.669 | 100 | 9.521.250.371 | 100 | 10.747.077.226 | 100 | 10.774.835.343 | 100 | 10.839.126.845 | 100 | 52.193.709.454 | | |
| | | | | | | - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan | Persen | 5 | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | | |
| ***3*** | ***30*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*** | ***Persen*** | ***100*** | ***100*** | ***40.000.000*** | ***100*** | ***70.000.000*** | ***100*** | ***80.000.000*** | ***100*** | ***85.000.000*** | ***100*** | ***95.000.000*** | ***100*** | ***370.000.000*** | | |
| ***3*** | ***30*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*** | ***Persen*** | ***100*** | ***100*** | ***5.848.140.619*** | ***100*** | ***6.138.045.650*** | ***100*** | ***6.437.447.932*** | ***100*** | ***6.758.820.329*** | ***100*** | ***7.091.911.346*** | ***100*** | ***32.274.365.876*** | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| *3* | *30* | *01* | *2.05* | | *Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah* | *Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *Persen* | *100* | *100* | *1.447.917.550* | *100* | *150.000.000* | *100* | *150.000.000* | *100* | *150.000.000* | *100* | *150.000.000* | *100* | 2.047.917.550 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.06 | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel* | *Persen* | *100* | *100* | *404.181.100* | *100* | *376.500.000* | *100* | *384.500.000* | *100* | *390.000.000* | *100* | *402.500.000* | *100* | 1.957.681.100 | | |
| 3 | 30 | 01 | 2.07 | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Sasaran* | *Persen* | *100* | *100* | *206.975.400* | *100* | *191.596.620* | *100* | *197.426.451* | *100* | *178.547.774* | *100* | *184.975.162* | *100* | 959.521.407 | | |
| *3* | *30* | *01* | *2.08* | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu* | *Persen* | *100* | *100* | *2.209.690.000* | *100* | *2.318.299.500* | *100* | *2.424.464.475* | *100* | *2.540.937.699* | *100* | *2.657.984.584* | *100* | *12.151.376.257* | | |
| *3* | *30* | *01* | *2.09* | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik* | *Persen* | *100* | 100 | *462.515.000* | *100* | *475.000.000* | *100* | *485.000.000* | *100* | *500.000.000* | *100* | *510.000.000* | *100* | *2.432.515.000* | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | 30 | 02 | | | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk | *Persen* | 100 | 100 | 61.560.353 | 100 | 66.158.187 | 100 | 72.394.768 | 100 | 72.581.753 | 100 | 73.014.835 | 100 | 345.709.896 | | |
| ***3*** | ***30*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*** | ***Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*** | ***Rekomendasi*** | ***4*** | ***2*** | ***31.560.353*** | ***4*** | ***31.158.187*** | ***4*** | ***32.394.768*** | ***3*** | ***27.581.753*** | ***3*** | ***23.014.835*** | **16** | **145.709.896** | | |
| ***3*** | ***30*** | ***02*** | ***2.06*** | | ***Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*** | ***Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota*** | ***Persen*** | ***Na*** | ***50*** | ***30.000.000*** | ***50*** | ***35.000.000*** | ***60*** | ***40.000.000*** | ***75*** | ***45.000.000*** | ***75*** | ***50.000.000*** | ***75*** | ***200.000.000*** | | |
| 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Persen | 0,07 | 85 | 1.182.369.473 | 92 | 1.890.646.572 | 92 | 2.068.873.508 | 92 | 2.220.017.884 | 100 | 2.386.593.584 | 100 | 9.748.501.021 | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ***3*** | ***30*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*** | ***Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*** | **Unit** | **10** | **13** | ***1.082.369.473*** | ***13*** | ***1.780.646.572*** | ***10*** | ***1.947.873.508*** | ***11*** | ***2.086.917.884*** | ***11*** | ***2.239.817.036*** | ***58*** | **9.137.624.473** | | |
| ***3*** | ***30*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*** | ***Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*** | ***Orang*** | ***81*** | ***83*** | ***100.000.000*** | ***84*** | ***110.000.000*** | ***90*** | ***121.000.000*** | ***90*** | ***133.100.000*** | ***90*** | ***146.776.548*** | *437* | ***610.876.548*** | | |
| 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | *Persen* | 10 | 50 | 185.000.000 | 65 | 308.178.541 | 75 | 337.229.829 | 75 | 338.100.844 | 75 | 340.118.230 | 75 | 1.508.627.444 | | |
| ***3*** | ***30*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*** | ***Persentase keterisian kapasitas gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (terpenuhi 50% - 80%)*** | ***Persen*** | ***Na*** | ***50*** | ***30.000.000*** | ***50*** | ***37.500.000*** | ***65*** | ***46.250.000*** | ***75*** | ***50.000.000*** | ***75*** | ***44.118.230*** | ***75*** | ***207.868.230*** | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ***3*** | ***30*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota*** | ***Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*** | ***Unit*** | ***6*** | ***6*** | ***130.000.000*** | ***6*** | ***240.678.541*** | ***6*** | ***255.979.829*** | ***6*** | ***248.100.844*** | ***6*** | ***251.000.000*** | ***30*** | ***1.125.759.214*** | | |
| ***3*** | ***30*** | ***04*** | ***2.03*** | | ***Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*** | ***Kali*** | ***4*** | ***4*** | ***25.000.000*** | ***4*** | ***30.000.000*** | ***4*** | ***35.000.000*** | ***4*** | ***40.000.000*** | ***4*** | ***45.000.000*** | 20 | ***175.000.000*** | | |
| 3 | 30 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | *Persen* | -42,2 | 20 | 610.000.000 | 20 | 639.646.348 | 30 | 1.199.944.349 | 30 | 701.752.202 | 30 | 705.939.431 | 30 | 3.857.282.330 | | |
| ***3*** | ***30*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*** | ***Persen*** | ***Na*** | ***20*** | ***610.000.000*** | ***20*** | ***639.646.348*** | ***20*** | ***1.199.944.349*** | ***30*** | ***701.752.202*** | ***30*** | ***705.939.431*** | ***30*** | ***3.857.282.330*** | | |
| 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | *Persen* | 12 | 60 | 142.196.500 | 65 | 150.968.780 | 72 | 165.995.160 | 75 | 170.325.752 | 75 | 185.091.449 | 75 | 814.577.641 | | |
| ***3*** | ***30*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Metrologi LegaL, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*** | ***Persentase UTTP yang sesuai standar*** | *Persen* | ***85*** | ***85*** | ***142.196.500*** | ***85*** | ***150.968.780*** | ***92*** | ***165.995.160*** | ***92*** | ***170.325.752*** | ***92*** | ***185.091.449*** | ***92*** | ***814.577.641*** | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 | 30 | 07 | | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten | *Persen* | 65 | 65 | 100.000.000 | 65 | 675.244.084 | 75 | 738.897.803 | 75 | 740.806.267 | 75 | 745.226.524 | 75 | 3.000.174.678 | | |
| ***3*** | ***30*** | ***07*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*** | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | ***Orang*** | ***Na*** | ***20*** | ***100.000.000*** | ***30*** | ***675.244.084*** | ***30*** | ***738.897.803*** | ***30*** | ***740.806.267*** | ***30*** | ***745.226.524*** | 140 | ***3.000.174.678*** | | |
| 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri | *Persen* | 50 | 87,5 | 672.344.817 | 92,5 | 400.000.000 | 95 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 2.272.344.817 | | |
| ***3*** | ***31*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*** | ***Fasilitasi*** | ***1*** | ***1*** | ***672.344.817*** | ***10*** | ***400.000.000*** | ***10*** | ***400.000.000*** | ***10*** | ***400.000.000*** | ***10*** | ***400.000.000*** | ***41*** | ***2.272.344.817*** | | |
| 3 | 31 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA | Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk | *Persen* | 100 | 100 | 0 | 100 | 130.000.000 | 100 | 140.500.000 | 100 | 156.550.000 | 100 | 173.205.000 | 100 | 600.255.000 | | |

| Kode | | | | | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ***3*** | ***31*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)*** | ***Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*** | ***Rekomendasi*** | ***2*** | ***6*** | ***0*** | ***6*** | ***130.000.000*** | ***7*** | ***140.500.000*** | ***7*** | ***156.550.000*** | ***7*** | ***173.205.000*** | 33 | ***600.255.000*** | | |
| 3 | 31 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Persentase peningkatan penyediaan informasi industri | *Persen* | 0,33 | 0,33 | 260.826.925 | 0,02 | 196.404.275 | 0,02 | 214.918.858 | 0,02 | 215.473.962 | 0,02 | 216.759.656 | 0,41 | 1.104.383.676 | | |
| ***3*** | ***31*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*** | ***Fasilitasi*** | ***2.970*** | ***5.000*** | ***260.826.925*** | ***400*** | ***196.404.275*** | ***420*** | ***214.918.858*** | ***450*** | ***215.473.962*** | ***480*** | ***216.759.656*** | ***6.900*** | ***1.104.383.676*** | | |
| | | | | | TOTAL PAGU PROGRAM | | | | | 13.833.717.737 | | 14.176.688.557 | | 15.497.593.133 | | 15.618.914.466 | | 16.318.319.800 | | 75.445.233.694 | | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator program pembangunan daerah sebagai bentuk upaya menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dan berdasarkan prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan digunakan sebagai barometer mendukung pencapaian janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan secara umum terhadap penerjemahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berdasarkan janji-janji atau platform politik dan visi misi tersebut kemudian didefinisikan kedalam program, kegiatan atau sub kegiatan yang berpedoman pada Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifkasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan akan dicapai pada periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1. Adapun indikator kinerja program kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan strategis dapat dilihat para Tabel 7.2.

**Tabel 7.1**
**Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026**
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | | | |
| Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | -7,25 | 5,83 | 4,61 | 12,04 | 6,73 | 6,82 | 6,60 | 6,60 |
| Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Non Migas | % | -5,26 | 5,45 | 4,14 | 15,04 | 7,82 | 8,11 | 7,47 | 7,47 |
| Nilai dan Predikat SAKIP | Nilai | 82,77 | 76,42 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | Predikat | A | BB | B | A | A | A | A | A |
| PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) | Miliar Rupiah | 4.509,51 | 4.772,54 | 4.662,83 | 4.963,12 | 5.285,72 | 5.631,94 | 6.003,65 | 6.003,65 |
| Pertumbuhan Industri | % | 0,74 | 11,4 | 9,39 | 2,00 | 2,36 | 2,69 | 3,00 | 3,00 |
| Pertumbuhan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas | % | -0,01 | -0,05 | 14,29 | 0,65 | 0,77 | 0,89 | 1,00 | 1,00 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

**Tabel 7.2**
**Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
**Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026**

| Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | | | | | | | | | |
| Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 109,8% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan | % | -16,17% | -5,84 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik | % | 95 | 97,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk | % | 81,48 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan | Rekomendasi | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota | % | 85 | - | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | % | 10 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik | Unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 52 |
| Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina | Orang | 81 | 83 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 444 |
| Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | % | 10 | 10 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Persentase keterisian kapasitas gudang barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat (terpenuhi 50% - 80%) | % | n/a | - | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 75 |
| Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar | Unit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan | Kali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | % | -42,2 | 178,9 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang | % | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | % | -84,16 | -50 | 60 | 65 | 72 | 75 | 75 | 75 |
| Persentase UTTP yang sesuai standar | % | 11,80 | 6,57 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten | % | n/a | n/a | 90,9 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri | Orang | n/a | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 140 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase pemenuhan capaian perencanaan dan pembangunan industri | % | 50 | 75 | 87,5 | 92,5 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah fasilitasi penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri | Fasilitasi | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 |
| Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan | Rekomendasi | 2 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 33 |
| Persentase peningkatan penyediaan informasi industri | % | 0,33 | 0,45 | 0,33 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri | Fasilitasi | 2,970 | 16.867 | 5.000 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6.900 |

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2022

# VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Renstra tersebut menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Secara lebih khusus, Renstra ini memiliki kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1) Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2) Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.
3) Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
4) Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BUPATI BLITAR**

**RINI SYARIFAH**